



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Pembangunan Huntap Korban Tsunami

Pembebasan Lahan tak Kunjung Rampung

SERANG, (KB).-

Pembangunan hunian tetap (hunta) untuk warga terdampak bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang 22 Desember lalu, belum dapat dilaksanakan. Soalnya, hingga kini proses pembebasan lahannya belum juga rampung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten M Yanuar mengatakan, Pemprov Banten sudah

menyiapkan anggaran Rp 11 miliar untuk membayar ganti rugi lahan untuk pembangunan hunta tersebut. Namun, saat ini pihaknya masih menunggu proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang.

"Peta bidang lahan yang akan dibangun hunta baru keluar kemarin. Setelah itu ada (SPH) Surat Pelepasar Hak. Kami menunggu itu,

● Bersambung ke halaman 12

● Pembebasan Lahan (Sambungan dari halaman 1)

karena SPH itu yang menjadi dasar pemprov untuk membayar," ujar Yanuar, akhir pekan lalu.

Yanuar menjelaskan, peta bidang merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang kondisi eksisting lahan dan siapa pemilik lahan yang akan dibebaskan. "Bahwa luas lahan milik si A sekian meter atau hektare. Nanti setelah itu keluar SPH yang menandakan bahwa itu sudah tidak dimiliki lagi oleh pemilik asal," ucapnya.

Disinggung mengenai kendala di BPN, Yanuar enggan berspekulasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan BPN. "Ada kewenangan (BPN). Kalau kami inginnya dari dulu kan, targetnya Agustus selesai. Sekarang proses di BPN, saya enggak punya kendali sampai sana. Kalau kami sudah tinggal bayar, rekening sudah ada. Begitu SPH keluar kami bayar," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini.

Ia menjelaskan, dalam pembangunan hunta Pemprov Banten hanya sebatas membebaskan lahan. Sementara yang membangun adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Begitu sudah dibayar selesai. Paling nanti kami dengan satker lakukan pendampingan," ucapnya.

Informasi yang diperoleh, ada sembilan titik yang akan dijadikan lokasi pembangunan hunta bagi sekitar 700 kepala keluarga. "Yang saya tau setiap rumah anggarannya Rp 50 juta. Tipenya 36," tuturnya.

Sementara, keterangan berbeda disampaikan Kepala BPN Pandeglang Agus Sutrisno. Menurutnya, SPH baru bisa diterbitkan setelah dilakukan pembayaran ganti rugi. "Kalau belum dibayar, logikanya tiba-tiba dibuatkan SPH. Mau enggak orangnya? Kan enggak mungkin," ujar Agus, melalui sambungan telepon, kemarin.

Ia menjelaskan, setelah peta bidang keluar seharusnya dilakukan penilaian oleh tim appraisal. Selanjutnya dilakukan musyawarah dengan para pemilik lahan. "Ngitungnya misalnya sudah, musyawarahnya sudah belum? Jadi pelepasannya bukan nunggu dari BPN," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan untuk hunta tersebut menjadi prioritas BPN Pandeglang. "Tentu saja untuk hunta ini jadi prioritas. Sudah menjadi instruksi pusat. SDM kami terbatas, makanya untuk hunta ini didahulukan dibanding yang lain," ujarnya. (H-42)***